

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adollf, Huala, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*, Refika Aditama, Bandung, 2014;
- Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011;
- Arrasjid, Chainur, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006;
- Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006;
- \_\_\_\_\_, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005;
- \_\_\_\_\_, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006;
- \_\_\_\_\_, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012;
- Ashofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004;
- Bachyul JB., Syofiardi, Roni Saputra, dan Andika D. Khagen, *Memahami Hukum Pers*, LBH Pers Padang, Padang, 2012;
- Eddyono, Supriyadi Widodo, *Problem Pasal Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik di Ranah Maya*, Jakarta, ELSAM, 2014;
- Efendi, A'an, Freddy Poernomo, dan IG. NG. Indra S. Ranuh, *Teori Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007;
- Fahmi, Khairul, *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011;
- Hadjon, Phillipus M., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987
- Hamidi, Jazim, dkk, *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*, Total Media, Yogyakarta, 2009;
- Huda, Ni'matul, *Hukum Tata Negara Indonesia (Edisi Revisi)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005;
- Indrati, Maria Farida, *Ilmu Perundang-undangan*, Kanisius, Yogyakarta, 2007;

- Kusumaningrat, Hikmat dan Kusumaningrat, Purnama, *Jurnalistik Teori dan Praktek*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2005;
- Laksono, Dandhy Dwi dkk., *Mematuhi Etik Menjaga Kebebasan Pers*, AJI Padang, Padang, 2012;
- Makmur, Hendra dkk., *Melawan Ancaman Kekerasan*, LBH Pers Padang, Padang;
- Mahfud MD., Moh., *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009;
- Manan, Bagir, *Pers, Hukum, dan Hak Asasi Manusia*, Dewan Pers, Jakarta, 2016;
- \_\_\_\_\_, *Politik Publik Pers*, Dewan Pers, Jakarta, 2012;
- \_\_\_\_\_, *Menjaga Kemerdekaan Pers di Pusaran Hukum*, Dewan Pers, Jakarta, 2011;
- Margiyono, *Seri Reformasi Kebijakan Media Seri II: Kasus Pencemaran Nama*, AJI Indonesia dan DRSP/USAID, Jakarta, 2010;
- \_\_\_\_\_, *Membangun Benteng Kekerasan; Seri Media Policy Reform*, Aliansi Jurnalis Independen, Jakarta, 2009;
- Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1996;
- \_\_\_\_\_, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2011;
- Nugroho, Bakti dan Samsuri, *Pers Berkualitas, Masyarakat Cerdas*, Dewan Pers, 2013;
- Pandu, Yudha, *Klien dan Advokat Dalam Praktek*, Jakarta, 2004;
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014;
- Rukmini, Mimin, dkk., *Pengantar Memahami Hak Ekosob*, Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO), Jakarta, 2006;
- Rukmini, Mimin dan Muhammad Mihradi, *Pemenuhan HAM Pendidikan dan Kesehatan di Daerah*, Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO), Jakarta, 2006;
- Rumokoy, Donald Albert dan Maramis, Frans, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016;

- Salman, Otje, *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Rafika Aditama, Jakarta, 2004;
- Sobur, Alex, *Etika Pers, Profesionalisme Dengan Nurani*, Humaniora Utama Press, Bandung, 2001;
- Soedarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian Terhadap Hukum Pidana*. Sinar Baru, Bandung, 1983;
- \_\_\_\_\_, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2007;
- Soekanto, Soejono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010;
- Sudirman, Aa dkk., *Menguji Ide Revisi UU Pers*, Aliansi Jurnalis Independen, Jakarta, 2009;
- Sumardjono, Maria S.W, *Metodologi Penelitian Hukum*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2005;
- Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2013;
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*, Rajawali Pers, Depok, 2018;
- Syafriadi, *Hukum Pers dalam Ketatanegaraan di Indonesia*, Suluh Media, Yogyakarta, 2018;
- Syaukani, Imam dan Thohari, A Ahsin, *Dasar-Dasar Politik Hukum* Cet. 11, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018;
- Tim LBH Pers, *Advokasi Kebebasan Pers: Perjalanan 6 Tahun LBH Pers*, LBH Pers, Jakarta, 2009;
- Thontowi, Jawahir, *Hukum Internasional Indonesia, Dinamika dan Implementasinya dalam Beberapa Kasus Kemanusiaan*, Madyan Press Yogyakarta, 2002;
- Utrecht, E, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Cet. 11, Jakarta, 1989;
- Wahjono, Padmo, *Ilmu Negara Suatu Sistematis dan Penjelasan 14 Teori Ilmu Negara dari Jellinek*, Melati Studi Group, Jakarta, 1977;
- \_\_\_\_\_, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986;

Wahidin, Samsul, *Hukum Pers*, Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006;

Widodo Eddyono, Supriyadi, *Problem Pasal Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik di Ranah Maya*, Jakarta, ELSAM, 2014;

### **Jurnal, Makalah, Buletin, Dan Essay**

Asep Mulyana, *Perkembangan Pemikiran HAM*, Pusat Dokumentasi ELSAM.

Avi Bell, Paper, *Libel Tourism: International Forum Shopping for Defamation Claims*.

Jurnal Dewan Pers, *Catatan Dari Indonesia Untuk World Press Freedom Day*, Edisi 13, Desember 2016

Henry Arianto, *Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia*, (2010) Lex Jurnalica, Volume 7, Nomor 2

Husnu Abadi, dkk (ed), *Bunga Rampai Demokrasi, HAM dan Negara Hukum, Kumpulan Tulisan Sebagai Penghormatan Bersempena dengan Pengukuhan Jabatan Guru Besar Prof. Dr. Hj. Ellydar Chaidir, S.H., M.Hum*, UIR Press, Pekanbaru, 2008.

Herlambang Perdana Wiratraman, *Konstitusionalisme dan Hak-hak Asasi Manusia, Konsepsi Tanggungjawab Negara dalam Sistem Ketatanegaraan*, Human Rights Law Studies Fac. Of Law Airlangga University, Jurnal Ilmu Hukum YURIDIKA Vol. 20, No. I Januari 2005.

---

\_\_\_\_\_, *Hukum dan Kebebasan Pers: Panduan Bantuan Hukum di Indonesia Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, Jakarta, YLBHI, 2014.

Hetty Hasanah, *Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia*, (<http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html>, 2004).

Ramon Kaban, *Jurnal Perspektif*, Volume IX No. 3, Tahun 2004 Edisi Juli.

Rober C. Post, *The Social Foundation of Defamation Law: Reputation and the Constitution*.

Spasimir Domaradzki, Margaryta Khvostova, dan David Pupovac, *Karel Vasak's Generations of Rights, and the Contemporary Human Rights Discourse*, Human's Right Review, 2019. Tautan: [https://www.researchgate.net/publication/335670633\\_Karel\\_Vasak%27](https://www.researchgate.net/publication/335670633_Karel_Vasak%27)

s Generations of Rights and the Contemporary Human Rights Dis  
course.

Suparman Marzuki, *Perspektif Mahkamah Konstitusi Tentang Hak Asasi Manusia: Kajian Tiga Putusan Mahkamah Konstitusi: Nomor 065/PUU-II/2004; Nomor 102/PUU-VII/2009 dan Nomor 140/PUU-VII/2009*, Jurnal Yudisial Vol. 6 No. 3 Desember 2013.

Toby Mendel, *Presentation on International Defamation Standards for Jakarta Conference*, Law Colloquium 2004, from *Insult to Slander: Defamation and the Freedom of the Press*, Jakarta, 28-29 Juli 2004.

Tesis hukum, “Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli,” <http://tesishukum.com/pengertianperlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, (diakses tanggal 8 Desember 2022, pukul 8:21 WIB)

Yuliandri, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang*, Orasi Ilmiah, disampaikan dalam dies natalis ke-57 Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2008.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak-Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang baru disahkan pada 6 Desember 2022, dalam Rancangan Undang-Undang KUHP versi 6 Desember 2022)

Peraturan Dewan Pers Nomor: 9/Peraturan-DP/X/2008 tentang Pedoman Hak Jawab

Peraturan Dewan Pers Nomor: 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers.

Peraturan Dewan Pers Nomor: 01/Peraturan-DP/VII/2017 tentang Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers

Surat Keputusan Dewan Pers No 05/SK-DP/III/2006 tentang Penguatan Peran Dewan Pers

### **Perjanjian International**

*Universal Declaration of Human Right* (Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia)

*International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik)

*Asean Human Right Declaration* (Deklarasi Hak Asasi Manusia Asean)

*Declaration of Rights of Man and Citizens (Declaration Droits de l'Homme et du Citoyen)*

### **Putusan Mahkamah Pengadilan**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU- VII/2009

Putusan PN Palopo Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Plp, Tanggal 23 November 2021;

### **Surat Edaran**

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 13 Tahun 2008 tentang Meminta Keterangan Saksi Ahli

## **Momerandum of Understanding (Nota Kesepahaman)**

Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dengan Kepolisian 2/DP/MoU/II/2017 dan Nomor: B/15/II/2017 yang ditandatangani pada Kamis 9 Februari 2012

Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dengan Kepolisian Nomor 01/DP/MoU/II/2012 dan Nomor 05/II/2012 yang ditanda tangani pada 9 Februari 2012

Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dengan Kejaksaan Agung. Republik Indonesia No. 01/DP/MoU/II/2013 No. 020/A/JA/02/2013 yang ditandatangani di Manado pada tanggal 11 Februari 2013

Nota Kesepahaman dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dengan Nomor 01/DP/MoU/II/2019 dan Nomor: KEP.040/A/JA/02/2019 yang ditandatangani di Surabaya Jawa Timur pada tanggal 9 Februari 2019

Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dengan Kepolisian Nomor 03/DP/MoU/III/2022 dan Nomor NK/4/III/2022 yang ditandatangani pada 16 Maret 2022

## **Tesis**

Setiono, *Rule of Law*, Tesis Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004

## **Internet**

Berita: Baru Disahkan DPR, UU KUHP Sudah Dipakai Oknum Perwira Polda NTB untuk Mengancam Jurnalis, sumber website:<https://gorontalo.tribunnews.com/2022/12/09/baru-disahkan-dpr-uu-kuhp-sudah-dipakai-oknum-perwira-polda-ntb-untuk-mengancam-jurnalis> (diakses pada 14 Desember 2022, pukul 07:40 WIB)

Berita: Ketika KUHP Digunakan untuk mengancam wartawan. Sumber website: <https://papuabaratnews.co/nasional/ketika-kuhp-digunakan-untuk-mengancam-wartawan/> (diakses pada 14 Desember 2022, pukul 07.30 WIB)

Berita media antaranews.com dengan judul “Mahfud MD: Pilar Demokrasi Tersisa Hanya Pers”, Sabtu, 1 Desember 2012, dalam situs website: <https://www.antaranews.com/berita/346371/mahfud-md-pilar->

demokrasi-tersisa-hanya-pers (Terakhir kali diakses pada 4 Juli 2022, Pukul 23:25)

Berita *Vivanews.com*, “*Todung Mulya Lubis: Politik Kebebaan Pers Dua Muka*”, 8 April 2009. <https://www.viva.co.id/arsip/47345-politik-kebebaan-pers-dua-muka> (diakses 10 November 2022; pukul 15:37 WIB)

Berita Media Regional Kompas dengan Judul ”Jurnalis di Buton Tengah yang Dituduh Cemarkan Nama Bupati Divonis 2 Tahun Penjara”, Jum’at, 27 Maret 2020, dalam situs website: <https://regional.kompas.com/read/2020/03/27/11364121/jurnalis-di-buton-tengah-yang-dituduh-cemarkan-nama-bupati-divonis-2-tahun> (diakses pada 9 November 2022)

Berita Media Portal Satu dengan Judul ”AJI dan LBH Pers Desak Polda Aceh Hentikan Penyidikan Kasus Jurnalis Bahrul”, Jum’at, 26 November 2021, dalam situs website: <https://portalsatu.com/aji-dan-lbh-pers-desak-polda-aceh-hentikan-penyidikan-kasus-jurnalis-bahrul/> (diakses pada 9 November 2022)

Berita: ICT: 71 Kasus Pidana Akibat UU ITE, sumber website: <http://nasional.tempo.co/read/news/2014/11/16/058622226/ICT-71-Kasus-Pidana-Akibat-UU-ITE> (diakses pada 6 November 2022, Pukul 15:47 WIB)

Berita "AJI: 3 Tahun Terakhir ada 15 Jurnalis-Media yang Dijerat UU ITE", sumber website: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211201151322-12-728525/aji-3-tahun-terakhir-ada-15-jurnalis-media-yang-dijerat-uu-ite> (diakses pada 10 Desember 2022, pukul 04:26 WIB)

Edaran tentang Tugas dan Fungsi Dewan Pers Berdasarkan UU No 40/1999 tentang Pers, 23 Juni 2021, [https://dewanpers.or.id/publikasi/pengumuman\\_detail/530/Edaran\\_tentang\\_Tugas\\_dan\\_Fungsi\\_Dewan\\_Pers\\_Berdasarkan\\_UU\\_No\\_40/1999\\_tentang\\_Pers](https://dewanpers.or.id/publikasi/pengumuman_detail/530/Edaran_tentang_Tugas_dan_Fungsi_Dewan_Pers_Berdasarkan_UU_No_40/1999_tentang_Pers) (diakses pada 11 November 2022, Pukul 7:34 WIB)

Hukum Online: RUU KUHP Tahun 2022 (Draf Final 6 Desember) (diakses 14 Desember 2022, Pukul 06:21 WIB). Sumber website: <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17797/rancangan-undang-undang-2022/document/lt638ed74050e8b>

Jean Bernard Myson, Perlindungan Terhadap Pers Di Negara Yang Sedang Berkonflik Menurut Hukum Internasional. Dalam website: <https://media.neliti.com/media/publications/14998-ID-perlindungan-terhadap-pers-di-negara-yang-sedang-berkonflik-menurut-hukum-intern.pdf> (diakses pada 13 Juli 2022, Pukul 21:21)



Maidah Purwanti, *Kewajiban Dan Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia*, sumber website: <https://lsc.bphn.go.id/artikel?id=365> (diakses pada 12 November 2022, Pukul: 4:32).

Mengadili UU Informasi dan Transaksi Elektronik: “Pemaparan Perkara – Perkara Penghinaan Terkait Dengan Penggunaan Teknologi Informasi”, sumber website: <https://icjr.or.id/mengadili-uu-informasi-dan-transaksi-elektronik-%E2%80%9Cpemaparan-perkara-perkara-penghinaan-terkait-dengan-penggunaan-teknologi-informasi%E2%80%9D/> (diakses pada 12 Desember 2022, Pukul 05:41).

Pernyataan Dewan Pers Nomor: 03/P-DP/XI/2021 tentang Keprihatinan Dewan Pers Terhadap Pemidanaan Wartawan Muhammad Asrul Di Pengadilan Negeri Palopo Selasa, 23 November 2021. Situs website: [https://dewanpers.or.id/assets/documents/kebijakan/2111270624\\_03-Pernyataan Dewan Pers.pdf](https://dewanpers.or.id/assets/documents/kebijakan/2111270624_03-Pernyataan_Dewan_Pers.pdf)(diakses pada 05/07/2022, Pukul 09:45)

Ridlo Eisy, Anggota Dewan Pers & Ketua Komisi Penelitian dan Ratifikasi Pers, 26 April 2012, website: <https://kaltim.antaranews.com/berita/6610/dewan-pers-sosialisasikan-mou-dengan-polri>

RUU KUHP Disahkan Menjadi Undang-Undang, sumber website: <https://ham.go.id/2022/12/06/35292/> (diakses pada 14 Desember 2022, Pukul 06:14 WIB)

Siaran Pers Dewan Pers, “Ancaman Kemerdekaan Pers, UU ITE Perlu Direvisi”, tanggal 7 April 2008, dalam situs website: [https://dewanpers.or.id/publikasi/siaranpers\\_detail/105/Siaran\\_Pers:\\_Ancam\\_Kemerdekaan\\_Pers,\\_UU\\_ITE\\_Perlu\\_Direvisi](https://dewanpers.or.id/publikasi/siaranpers_detail/105/Siaran_Pers:_Ancam_Kemerdekaan_Pers,_UU_ITE_Perlu_Direvisi)(Terakhir kali diakses pada 21 juni 2022, Pukul 20:49).

*The History of Defamation Law*, <http://tree.com/legal/the-history-of-defamation-law.aspx> (diakses pada 12 Desember 2022, pukul 21:38)

[https://dewanpers.or.id/publikasi/siaranpers\\_detail/105/Siaran\\_Pers:\\_Ancam\\_Kemerdekaan\\_Pers,\\_UU\\_ITE\\_Perlu\\_Direvisi](https://dewanpers.or.id/publikasi/siaranpers_detail/105/Siaran_Pers:_Ancam_Kemerdekaan_Pers,_UU_ITE_Perlu_Direvisi) (diakses pada 21 juni 2022, pukul 20:49).

<https://regional.kompas.com/read/2020/03/27/11364121/jurnalis-di-buton-tengah-yang-dituduh-cemarkan-nama-bupati-divonis-2-tahun> (diakses pada 9 November 2022)

<https://portalsatu.com/aji-dan-lbh-pers-desak-polda-aceh-hentikan-penyidikan-kasus-jurnalis-bahrul/> (diakses pada 9 November 2022)

<https://dewanpers.or.id/kontak/faq/start/50> (diakses pada 10 November 2022, pukul 14:20 WIB).

